

PARADIGMA-PARADIGMA PEMBANGUNAN

Oleh:

Drs. Desi Fernanda, MSocSc.

Deputi Bid. Litbang APOAN -
LANRI

CURICULUM VITAE - SINGKAT

NAMA	: DESI FERNANDA, DRS, MSOCSC.
NIP	: 270000689
JABATAN	: DEPUTI Bid. Litbang Adm Pembangunan Dan Otomasi Adm.Negara
GOL/RUANG	: Pembina Utama / Gol. IV e (Oktober, 2009)
TGL LAHIR	: 4 Desember 1958, di Cimahi, Bandung, Jawa Barat
PENDIDIKAN	: - Sarjana Ekonomi, Jurusan Manajemen , FE-UNPAD, Iulus 1984 - Dipl. Development Admin., ILGS – Univ of Birmingham, UK, 1990 - Master of Social Science, ILGS – Univ of Birmingham, UK, 1992
Diklatpim	: Sepadya Nas., 1992/93, LAN Bandung Diklatpim II, Angk. I, Kls A, 2001, LAN RI, Jakarta Diklatpim I, Angk. X, 2006, LAN RI, Jakarta
Lain-lain	: Kursus Singkat Angkatan (KSA) XVI/2009, LEMHANNAS RI, Jakarta, 2009
RWYT KERJA	: Sejak tahun 1986-Sekarang, PNS LANRI
JABATAN	: Tahun 1992/93 s/d tahun 2001, beberapa jabatan Eselon III a (Kepala Bidang) di LAN Perwakilan Jawa Barat, Bandung Tahun 2001-2005 Kepala Pusat Kajian Otda di LAN Jkt. Tahun 2005 s/d Jan.2007, Kepala PKP2A I LAN – Bandung Tahun 2007 -, Deputi Bid. Litbang APOAN - LANRI
KARYA ILMIAH	: Beberapa Modul Diklat Pim IV dan III LANRI, Artikel dalam beberapa Jurnal Ilmiah, dan berbagai Makalah Kajian
LAIN-LAIN	: Anggota Tim Revisi UU 22/1999 (thn.2003) Anggota "KOREKSI"-Partnership For Governance Reform (2003) Konsultan Kelembagaan berbagai Daerah dan Lemb. Donor Perintis Jurnal Wacana Kinerja dan Jurnal Desentralisasi di LAN Sejak tahun 1989-Sekarang, Dosen LB STIA LANRI Sejak tahun 1997- 2007 Dosen LB S-2 BKU Kebijakan Publik FISIP-UNPAD, Kerjasama UNPAD-LAN. Sejak tahun 2001- 2006, Dosen LB S-2 MPKP FE UI. Sejak tahun 1992 – Sekarang, Pengajar Diklatpim IV, III, II, I.

KONSEP PEMBANGUNAN

Secara sederhana dapat dirumuskan dengan definisi:

“PROSES PERUBAHAN KE ARAH KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK”

(The International Development Dictionary, Fry and Martin, 1991:98-100)

“Development is commonly used to describe "improvement" (Hadjor, 1992:100), or betterment, or "beneficial alteration" (Crocker, 1993:62) in the human condition.”
(Donald Osborn, 1993)

Development possibility

- Is Development possible in traditional societies?

- Before the 1930's
 - No – Development is Culturally Bounded
 - After the 1930's



- Yes



BEBERAPA ISTILAH YANG RELEVAN DENGAN KONSEP PEMBANGUNAN

- MODERNISASI (WESTERNISASI)
 - PERUBAHAN (CHANGES)
 - KEMAJUAN (PROGRESS)
- PERBAIKAN (IMPROVEMENT)
- PERTUMBUHAN (GROWTH)

PERKEMBANGAN STUDI PEMBANGUNAN

- BERAWAL DARI PROSES *RECOVERY* PASCA PERANG DUNIA II DI EROPA BARAT
 - IMPLEMENTASI MARSHALL PLAN -> IBRD (SEKARANG WORLD BANK) SEBAGAI MEDIA PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN DENGAN SPONSOR UTAMA AMERIKA SERIKAT
- BERAKHIRNYA KOLONIALISME PASCA PD II MENGHASILKAN NEGARA-NEGARA BARU MERDEKA DI ASIA DAN AFRIKA, BAIK MELALUI PROSES REVOLUSI, MAUPUN PEMBERIAN KEMERDEKAAN/ PENYERAHAN KEDAULATAN NEGARA DARI NEGARA PENJAJAH.
- NEGARA-NEGARA BARU MERDEKA (UDC) BERUSAHA MEMBANGUN UNTUK MENGATASI KETERBELAKANGAN DAN KETERTINGGALAN DARI NEGARA-NEGARA MAJU (NEGARA-NEGARA BARAT) DENGAN ATAU TANPA BANTUAN NEGARA-NEGARA MAJU
 - PEMBANGUNAN PADA AWALNYA IDENTIK DENGAN MODERNISASI (BACA: WESTERNISASI, UNTUK MERUJUK KE AS, INGGERIS DLL.)
 - SEBAGIAN NEGARA-NEGARA BARU MERDEKA MENEMPUH POLA NEGARA-NEGARA “TIMUR” (EROPA TIMUR YANG KOMUNIS/SOSIALIS)
- FENOMENA KETERPURUKAN SOSIAL-EKONOMI DI NEGARA-NEGARA AMERIKA LATIN
- FENOMENA KEMAJUAN SOSIAL-EKONOMI NEGARA-NEGARA ASIA TIMUR
- FENOMENA GLOBALISASI & REGIONALISASI EKONOMI DAN MELEMAHNYA PEREKONOMIAN NEGARA-NEGARA MAJU

PENGERTIAN PARADIGMA

“Paradigms are a set of simplifying assumptions and informal theories that describe how the world works and which provides the frame of reference through which the world is viewed.”

[PARADIGMA ADALAH SATU SET ASUMSI-ASUMSI PENYEDERHANAAN DAN TEORI INFORMAL YANG MENGGAMBARKAN BAGAIMANA DUNIA BEKERJA, DAN YANG MENYEDIAKAN KERANGKA ACUAN BAGI MANUSIA UNTUK MEMANDANG KEHIDUPAN DUNIA DISEKELILINGNYA]

(<http://www.uvm.edu/~eirvin/overheads/Paradigms.html>)

PENGERTIAN PARADIGMA

Secara ringkas pengertian Paradigma juga dapat dirumuskan dengan beberapa ungkapan, masing-masing sebagai berikut:

- Model atau Pola yang dapat diterima
- Pandangan Dunia (*Worldview*)
- Kerangka Acuan (*Frame of Reference*)
- Satu set saringan ("Filter") atau cetakan ("Molds") dalam pikiran seseorang untuk memproses informasi (seringkali tanpa disadari)
 - Ini membentuk pola bagaimana kita memproses informasi dan mengambil berbagai keputusan;
 - Paradigma tidak bersifat statis, melainkan dinamis; dan perubahan dalam paradigma akan tercermin dalam perubahan perilaku.

(<http://www.uvm.edu/~eirvin/overheads/Paradigms.html>)

What is a paradigm?

- It is a way of seeing reality shared by the members of a discipline.
- A general accepted perspective providing a unifying explanation for a set of phenomena in some disciplines, for example in the social sciences, physics, biology, literature, and so forth.
- A paradigm serves to develop models for explaining one aspect of reality, and methods to test a theory and develop a fuller understanding of the topic.

(Carlos Benito, Sonoma University)

Perspectives about Development-1945-1982: different ways of asking the question

- How to induce economic development?
- What are the obstacles to economic development?
- How is that economic development is not possible under capitalism.

WORLD BANK DAN TERUTAMA IMF
DIANGGAP BERTANGGUNGJAWAB
ATAS KETERPURUKAN NEGARA-
NEGARA BERKEMBANG DI AMERIKA
LATIN DAN AFRIKA



**PERSPEKTIF
WAKTU
PERKEMBANGAN
PARADIGMA
PEMBANGUNAN**

PROFIL PARADIGMA PEMBANGUNAN

■ PARADIGMA MODERNISASI

- PERUBAHAN SOSIAL SEBAGAI PROSES EVOLUSI
- PERUBAHAN MASYARAKAT TRADISIONAL (EKS JAJAHAN, PETANI, STATIS, TERTUTUP, MISKIN) KE MASYARAKAT MODERN (EMULASI POLA PERILAKU/BUDAYA BARAT, INDUSTRIALISASI, DINAMIS, TERBUKA, SEJAHTERA)
- NATION BUILDING

■ PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI

- KESEJAHTERAAN HANYA DAPAT DIWUJUDKAN MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI
- PERTUMBUHAN EKONOMI TERJADI MELALUI EKSPOR PRODUKSI NASIONAL (PASAR DOMESTIK TIDAK MAMPU SERAP)
- PERTUMBUHAN EKONOMI LEBIH CEPAT MELALUI INDUSTRIALISASI
- SEKTOR PRIMER/PERTANIAN MENSUBSIDI SEKTOR SEKUNDER/INDUSTRI
- KEBUTUHAN INVESTASI DIPENUHI DARI LOAN & MODAL ASING
- MEMBAYAR BUNGA LOAN DARI DEVISA HASIL EKSPOR (SEKTOR PRIMER/PERTANIAN)
- PRODUKTIVITAS SEKTOR PRIMER DIDORONG MELALUI STRATEGI REVOLUSI HIJAU, DENGAN INTENSITAS SUBSIDISASI YANG TINGGI.
- EXPLOITASI SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR PRIMER LAINNYA BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP KESEIMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP. PADA PUNCARKNYA SDA HABIS, LINGKUNGAN RUSAK, PENCEMARAN TINGGI, DESERTIFIKASI, DAN KELAPARAN YANG SANGAT TERUTAMA DI NEGARA-NEGARA SUB-SAHARA AFRIKA.

PROFIL PARADIGMA PEMBANGUNAN

■ PARADIGMA HUMAN CAPITAL

- MODAL PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL ADALAH TENAGA KERJA YANG MURAH (UNSKILLED)
- EKSPLORASI PEKERJA MURAH DI SEKTOR PRIMER MAUPUN SEKUNDER
- MIGRASI TENAGA KERJA DARI SEKTOR PRIMER KE SEKTOR SEKUNDER, DARI DESA KE KOTA
- RAKYAT HANYA MERUPAKAN OBYEK, BUKAN SUBYEK PEMBANGUNAN

■ PARADIGMA DEPENDENSI

- PROSES PEMBANGUNAN DENGAN BANTUAN ASING (MODAL MAUPUN TENAGA AHLI) HANYA MENGUNTUNGKAN PIHAK ASING DAN MENAMBAH KETERPURUKAN DAN EKSPLORASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA NASIONAL/LOKAL.
- DAMPAK BIAS INDUSTRIALISASI DAN SUBSIDISASI SEKTOR PRIMER MENIMBULKAN KETERGANTUNGAN SEKTOR PRIMER KEPADA SEKTOR SEKUNDER, DESA TERHADAP KOTA, PERIPHERY TERHADAP CENTER
- RAKYAT SEMAKIN TERPURUK DAN MISKIN SEMENTARA KELAS MASYARAKAT PERKOTAAN ATAU PARA KAPITALIS MENIKMATI HASIL-HASIL PEMBANGUNAN DAN SEMAKIN KAYA

PROFIL PARADIGMA PEMBANGUNAN

■ PARADIGMA BASIC NEEDS

- MODAL PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL ADALAH TENAGA KERJA YANG MURAH (UNSKILLED)
- EKSPLOITASI PEKERJA MURAH DI SEKTOR PRIMER MAUPUN SEKUNDER
- MIGRASI TENAGA KERJA DARI SEKTOR PRIMER KE SEKTOR SEKUNDER, DARI DESA KE KOTA
- RAKYAT HANYA MERUPAKAN OBYEK, BUKAN SUBYEK PEMBANGUNAN

■ PARADIGMA LIBERALISASI / STRUCTURAL ADJUSTMENT

- RESESI EKONOMI DUNIA PADA PERTENGAHAN TAHUN 1970-AN SEBAGAI AKIBAT KENAIKAN HARGA MINYAK DUNIA TELAH MENYEBABKAN MASALAH MAKROEKONOMI DI BERBAGAI NEGARA PENGIMPOR MINYAK BUMI, TERUTAMA YANG JUGA TERLIBAT KEWAJIBAN HUTANG TERHADAP WORLD BANK MAUPUN IMF. TERJADI KESULITAN MEMPEROLEH DEVISA.
- WB & IMF YANG MENANGANI KRISIS EKONOMI MENAWARKAN PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN STRUKTURAL (STRUCTURAL ADJUSTMENT) DAN ATAU STABILISASI EKONOMI.
- PENGETATAN PENGELOUARAN BELANJA NEGARA DAN KEUANGAN/ PERBANKAN (TIGHT MONEY POLICY)
- PENGURANGAN INTERVENSI PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI UNTUK MENGURANGI DISTORSI PASAR
- PRIVATISASI DAN PERDAGANGAN BEBAS (FREE TRADE)
- KEBIJAKAN STABILISASI EKONOMI YANG BERDAMPAK PADA PENGETATAN BELANJA NEGARA UNTUK PEMBANGUNAN SEKTOR NON PRODUKTIF (SOSIAL) BERDAMPAK PADA PENINGKATAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN, SEHINGGA MENIMBULKAN KRISIS PADA TATARAN MIKROEKONOMI, DI BANYAK NEGARA DI AMERIKA LATIN DAN AFRIKA TELAH MENIMBULKAN GEJOLAK SOSIAL DAN POLITIK YANG BERAKHIR DENGAN KUDETA ATAUPUN PERANG SAUDARA, SEHINGGA MENAMBAH BEBAN PENDERITAAN RAKYAT.
- EXPLOITASI SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR PRIMER LAINNYA UNTUK MENGHASILKAN DEVISA, BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP KESEIMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP. PADA PUNCAKNYA SDA HABIS, LINGKUNGAN RUSAK, PENCEMARAN TINGGI, DESERTIFIKASI, DAN KELAPARAN YANG SANGAT TERUTAMA DI NEGARA-NEGARA SUB-SAHARA AFRIKA.

PROFIL PARADIGMA PEMBANGUNAN

■ PARADIGMA GROWTH WITH EQUITY ATAU GROWTH WITH A HUMAN FACE

- MERUPAKAN PENDEKATAN KOREKSI ATAS KEGAGALAN PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN STABILISASI EKONOMI/STRUCTURAL ADJUSTMENT DARI IMF DAN WORLD BANK.
- PEMERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN MELALUI BERBAGAI PROGRAM SAFETY NET UNTUK MERINGANKAN BEBAN RAKYAT MISKIN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MEREKA
- PROGRAM PADAT KARYA (WORK FOR FOOD) DSB.
- PERBAIKAN STRUKTURAL DI SEKTOR PRODUKTIF
- PENGURANGAN INTERVENSI PEMERINTAH UNTUK MENGURANGI DISTORSI PASAR

■ PARADIGMA SOCIAL CAPITAL DAN SOCIAL DEVELOPMENT

- PARADIGMA SOCIAL CAPITAL MEMPRIORITASKAN PEMBANGUNAN PADA PERBAIKAN KELEMBAGAAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT, PERHATIAN PADA PERTUMBUHAN DAN HAK-HAK SOSIAL ANAK-ANAK, PERUBAHAN NILAI-NILAI SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG KONDUSIF BAGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS YANG MENDORONG PERTUMBUHAN AKTIVITAS EKONOMI
- PARADIGMA SOSIAL DEVELOPMENT BERORIENTASI PADA PENCAPAIAN KONDISI-KONDISI PERBAIKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT SEBAGAI DAMPAK POSITIF HASIL PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI. NAMUN DEMIKIAN SUBYEK PADA SOSIAL DEVELOPMENT MASIH CENDERUNG BIAS PADA SEKTOR-SEKTOR PRODUKTIF ATAU SISTEM PASAR DAN PARA PELAKU PASAR MAUPUN APARATUR PEMERINTAH SEBAGAI PELAKSANA ATAU AGEN PEMBANGUNAN
- PARADIGMA SOSIAL KAPITAL DINILAI LEBIH EGALITARIAN DAN LEBIH PRO-RAKYAT MISKIN, MELALUI BERBAGAI PROGRAM DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SOSIAL, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PELATIHAN KERJA DAN SEBAGAINYA YANG CENDERUNG MEMBERDAYAKAN KAPASITAS RAKYAT.

PROFIL PARADIGMA PEMBANGUNAN

■ PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

- DIILHAMI OLEH HASIL PENELITIAN KOMISI BRUNDLANT DI AFRIKA DAN LAPORAN UNEP DAN UNECA TENTANG KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI AFRIKA, TERUTAMA DI SUB-SAHARA AFRIKA, SEBAGAI DAMPAK KEGAGALAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN YANG JUGA DI SPONSORI WORLD BANK MAUPUN IMF.
- WORLD BANK KEMUDIAN MEMPROMOSIKAN STRATEGI ATAU PARADIGMA SUSTAINABLE DEVELOPMENT, YAITU PROSES PEMBANGUNAN DENGAN MENGUTAMAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG RAMAH LINGKUNGAN SERTA MEMPERHATIKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM BAGI KELANGSUNGAN GENERASI MASA DEPAN
- SUSTAINABLE DEVELOPMENT MENEKANKAN AGAR PROSES PEMBANGUNAN DAPAT MEMINIMALKAN DAMPAK LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG TERHADAP PENINGKATAN EFEK RUMAH KACA YANG BERAKIBAT PEMANASAN GLOBAL YANG MENGANCAM KEHIDUPAN BANGSA-BANGSA DI DUNIA.
- PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN JUGA DIDUKUNG OLEH BERBAGAI PROTOKOL INTERNASIONAL SEPERTI PROTOKOL KYOTO DAN AGENDA 21 DI BIDANG PELESTARIAN LINGKUNGAN

PROFIL PARADIGMA PEMBANGUNAN

■ PARADIGMA HUMAN DEVELOPMENT

- PARADIGMA HUMAN DEVELOPMENT DIPROMOSIKAN OLEH UNDP DAN TELAH MENJADI KOMITMEN GLOBAL SEBAGAI KERANGKA PEMBANGUNAN DI BERBAGAI NEGARA. TERMASUK DI NEGARA-NEGARA MAJU SEKALIPUN.**
- PARADIGMA INI DILANDASI OLEH KEYAKINAN DAN PENGAKUAN ATAS KEKUATAN PEOPLE CHOICES (PILIHAT RAKYAT), DALAM ARTI RAKYAT HARUS DIBERI KESEMPATAN UNTUK MENGGUNAKAN KAPABILITAS DAN KAPASITASNYA UNTUK MEMBANGUN DIRINYA SENDIRI DAN UNTUK MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN HIDUP GENERASI PENERUSNYA DENGAN SUMBER DAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI SECARA BERKELANJUTAN.**
- PARADIGMA INI BERSIFAT UNIVERSAL, MEMPERHATIKAN ANTAR MEANS DAN ENDS, NON DISKRIMINATIF, MENEMPATKAN MASYARAKAT SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN, MENDORONG PENINGKATAN KAPABILITAS MAUPUN PENGGUNAANNYA, DAN MENGURANGI DEPRIVASI (PENDERITAAN), DAN BERORIENTASI PADA SUSTAINABILITY ATAU KEBERLANJUTAN KESEJAHTERAAN GENERASI PENERUS.**



PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI PARADIGMA KEBANGSAAN INDONESIA

- **BAWAH SESUNGGUHNYA KEMERDEKAAN IALAH HAK SEGALA BANGSA DAN OLEH SEBAB ITU, MAKAN PENJAJAHAN DI ATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN, KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERI KEMANUSIAAN DAN PERI KEADILAN**
- **DAN PERJUANGAN PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA TELAH SAMPAILAH PADA SAAT YANG BERBAHAGIA DENGAN SELAMAT SENTAUSA MENGANTARKAN RAKYAT INDONESIA KEDEPAN PINTU GERBANG KEMERDEKAAN NEGARA INDONESIA YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR.**
- **ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DAN DENGAN DIDORONGKAN OLEH KEINGINAN LUHUR, SUPAYA BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS, MAKAN RAKYAT INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI KEMERDEKAANNYA.**
- **KEMUDIAN DARIPADA ITU UNTUK MEMBENTUK SUATU PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAAN ABADI, DAN KEADILAN SOSIAL, MAKAN DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA ITU DALAM SUATU UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA, YANG TERBENTUK DALAM SUATU SUSUNAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERKEDAUULATAN RAKYAT DENGAN BERDASARKAN KEPADA: KETUHANAN YANG MAHA ESA, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, PERSATUAN INDONESIA, KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKASANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.**

Keyakinan Bangsa Sebagai Cara Memandang Dunia

Kemerdekaan :

- Hak Segala Bangsa
- Berkehidupan Kebangsaan Yang Bebas

Nilai Kebebasan:

- Peri Kemanusiaan
- Peri Keadilan

Hakekat Kemerdekaan:

- **RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

Cita-Cita Bangsa Indonesia (Visi Kemerdekaan Indonesia)

- Merdeka
- Bersatu
- Berdaulat
- Adil
- Makmur

Dalam suatu tatanan yang bersifat integralistik:

**SUSUNAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
YANG BERKEDAUULATAN RAKYAT**

Tugas Pemerintahan Negara Indonesia

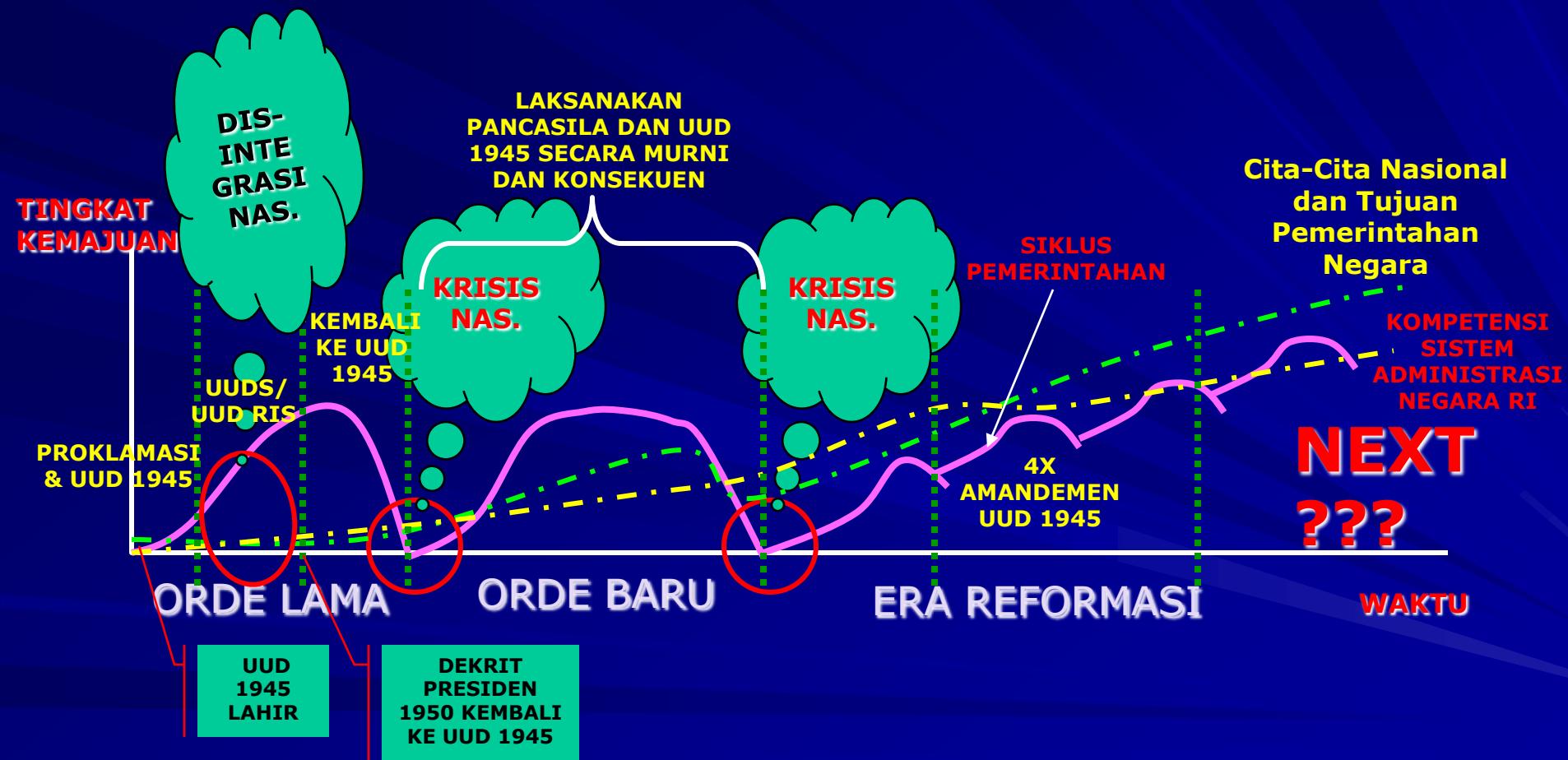
*Melindungi segenap bangsa indonesia
dan seluruh tumpah darah indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial*

Tugas Pemerintahan Negara Indonesia

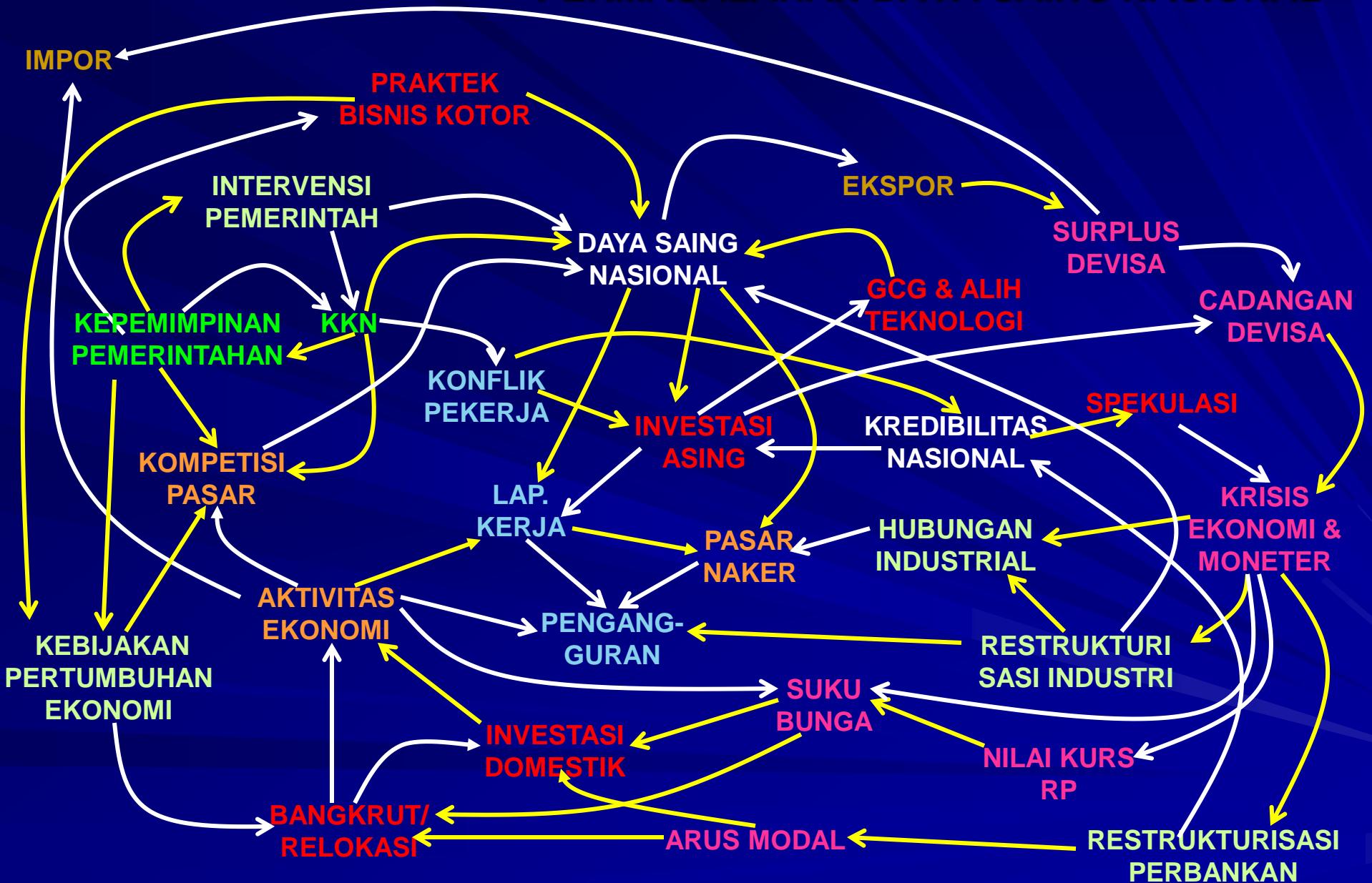
- ***Siapa yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia?***
- ***Siapa yang memajukan kesejahteraan umum?***
- ***Siapa yang mencerdaskan kehidupan bangsa? dan***
- ***Siapa yang ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial?***

APA KONSEKUENSINYA ???!!!

DINAMIKA KONSTITUSI NEGARA, SIKLUS PEMERINTAHAN, SISTEM ADMINISTRASI NEGARA, DAN CITA-CITA NASIONAL



RICH PICTURES PERMASALAHAN DAYA SAING NASIONAL

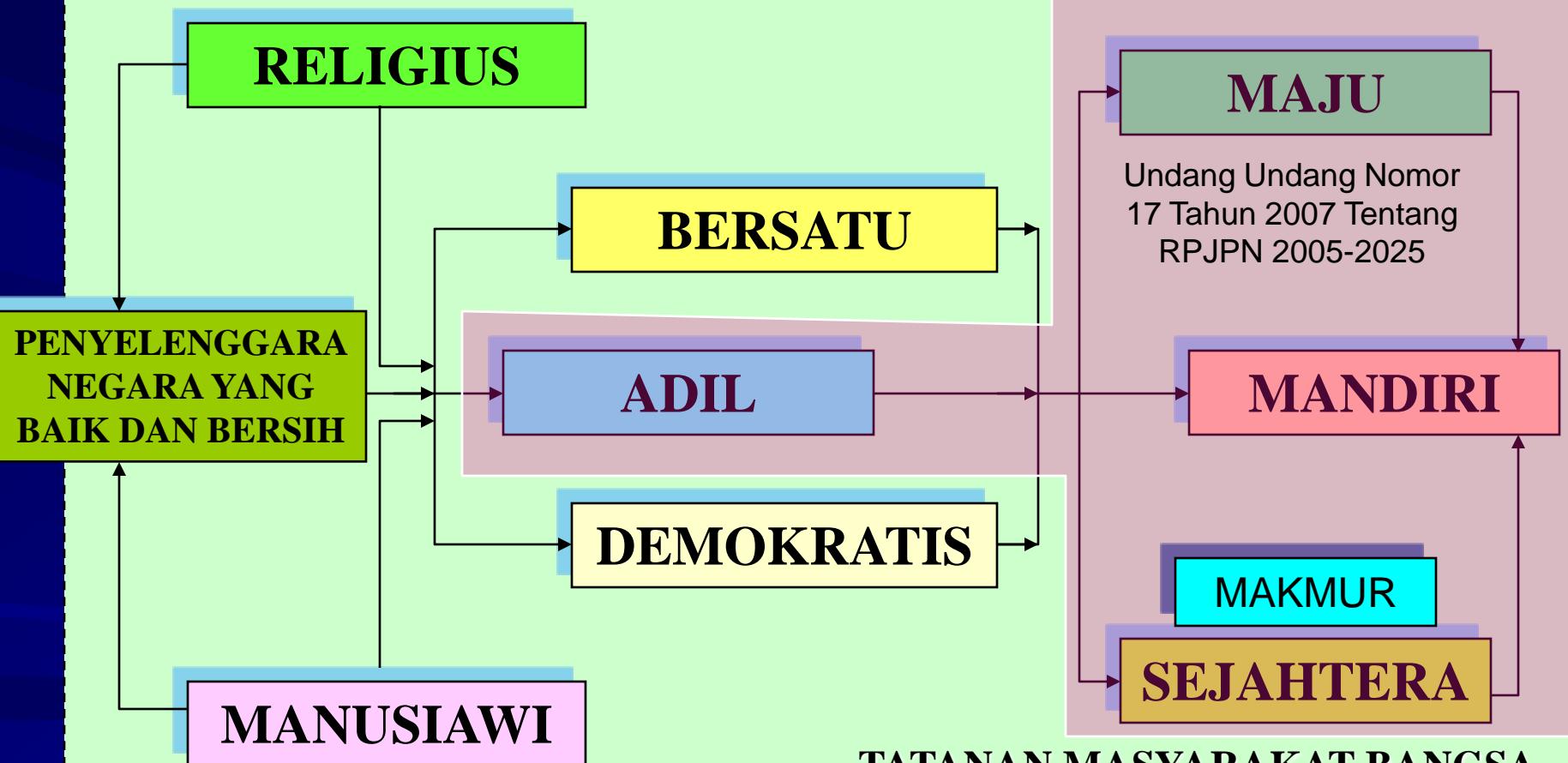


RICH PICTURE EQUILIBRIUM PEMBANGUNAN



VISI INDONESIA 2020

(Tap MPR No. VII/MPR/2001)



Misi Pembangunan Jangka Panjang Nasional

2005 - 2025

- Mewujudkan masyarakat berakhhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Misi Pembangunan Jangka Panjang Nasional

2005 - 2025

- Mewujudkan masyarakat berakhhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



- Diproyeksikan menurun dari angka 6 persen pada 2008 menjadi 4,4 persen pada 2009. Pada 2010 diperkirakan akan kembali membaik menjadi 5,9 persen

Menggerakkan
Sektor Riel

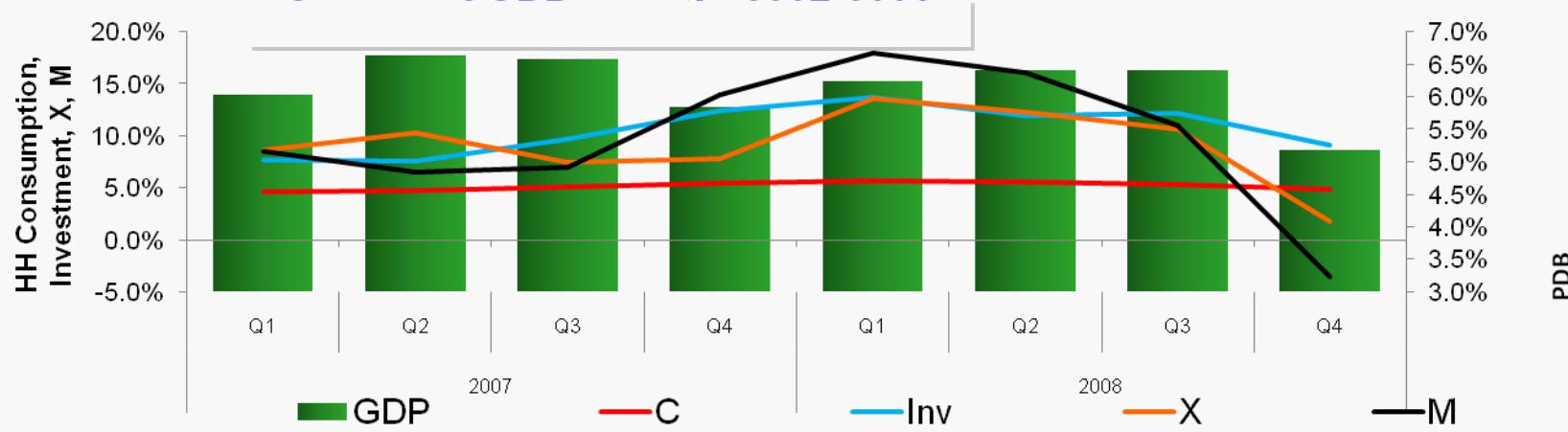
Ina Primiana

Guru Besar Fakultas Ekonomi Unpad

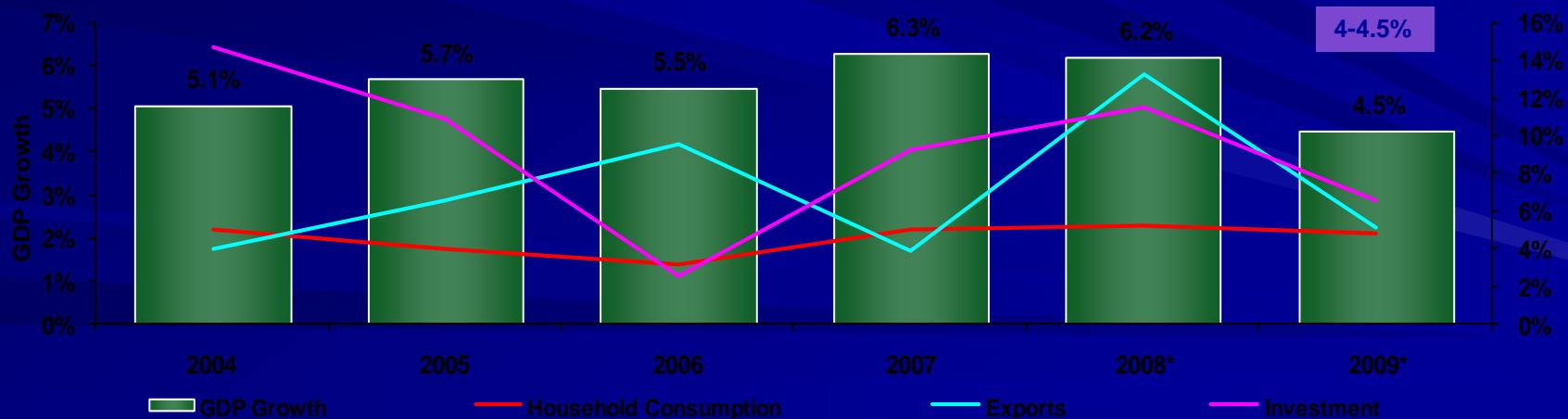
Disampaikan pada Pekan Ilmiah Universitas Padjadjaran Dalam
Rangka Dies Natalis ,Bandung, 19 November 2009

Walaupun Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2009 Melambat, namun masih lebih baik dari yang diperkirakan...

Sumber-sumber Pertumbuhan PDB (%) 2007 -2008



Pertumbuhan PDB 2004-2009 (yoy, %)



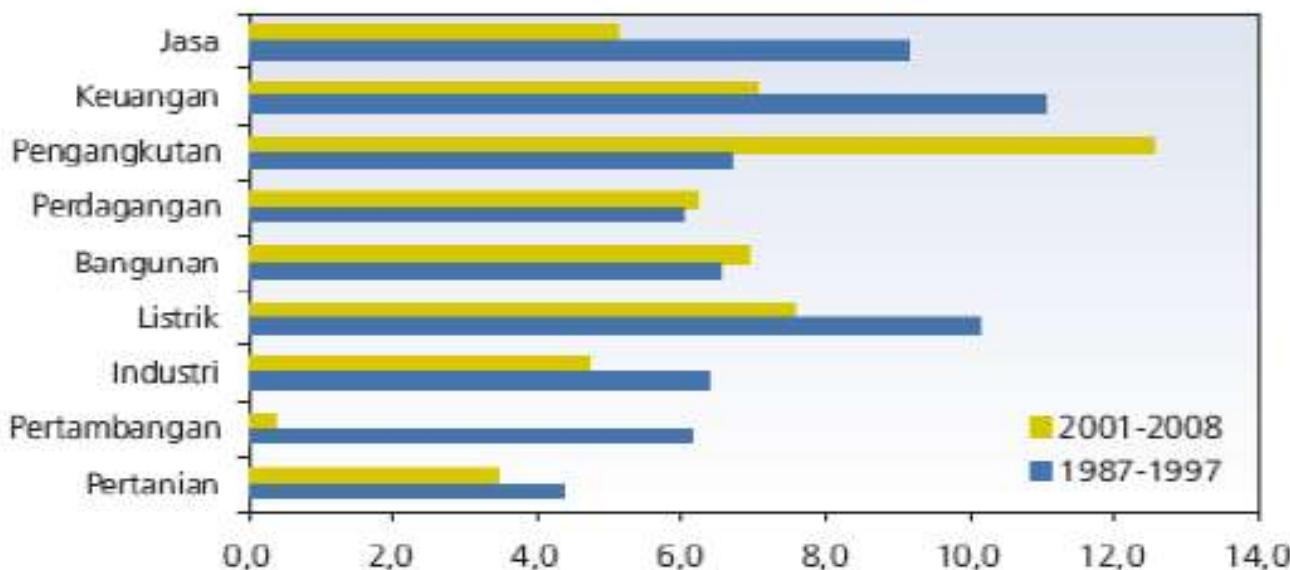
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEUANGAN DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE

PAPARAN MENTERI KEUANGAN RI

Disampaikan dalam Program Pendidikan Singkat Angkatan XVI Lemhanas RI Tahun 2009

Jakarta, 8 Mei 2009

Kinerja Sektoral



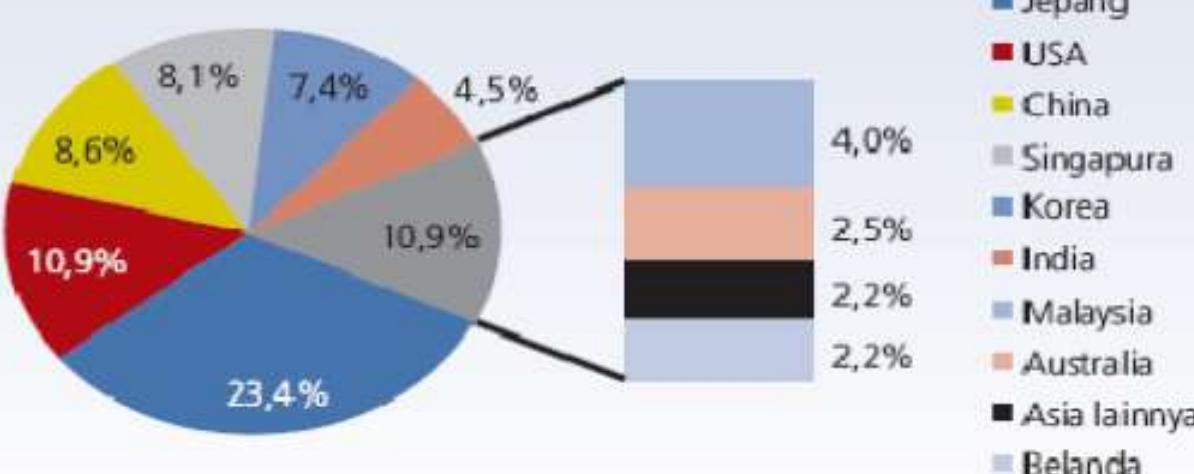
Sumber : Bank Indonesia

Menggerakkan Sektor Rii

Ina Primiana
Guru Besar Fakultas Ekonomi Unpad

Disampaikan pada Pekan Ilmiah Universitas Padjadjaran Dalam
Rangka Dies Natalis ,Bandung, 19 November 2009

Pangsa Ekspor Negara Mitra Dagang Indonesia



Sumber : Bank Indonesia

Menggerakkan Sektor Ritel

Ina Primiana
Guru Besar Fakultas Ekonomi Unpad

Disampaikan pada Pekan Ilmiah Universitas Padjadjaran Dalam
Rangka Dies Natalis ,Bandung, 19 November 2009

Global Competitiveness Index

No	Negara	GCI	GCI	GCI
		2006-2007	2007-2008	2008-2009
1	Singapore	7	7	5
2	Malaysia	21	21	21
3	Thailand	28	28	34
4	Indonesia	51	54	55
5	Vietnam	64	68	70
6	Philipina	71	67	71

Sumber :

WEF Report , 2007-2008,2008-2009

Ina Primiana

Guru Besar Fakultas Ekonomi Unpad

No	Pilar	2006-2007	2007-2008	2008-2009
1	Kelembagaan	60	63	68
2	Infrastruktur	78	91	86
3	Stabilitas Ekonomi makro	73	89	72
4	Pendidikan Dasar dan Kesehatan	83	78	87

Peringkat 12 Pilar Global Competitiveness Index

No	Pilar	2006-2007	2007-2008	2008-2009
5	Pelatihan dan Pendidikan tinggi	70	65	71
6	Efisiensi Pasar Barang	33	23	37
7	Efisiensi Pasar Tenaga Kerja	51	31	43
8	Kecanggihan Pasar Uang	58	50	57

Sumber : WEF Report , berbagai edisi

Menggerakkan Sektor Rii

Ina Primiana
Guru Besar Fakultas Ekonomi Unpad
Disampaikan pada Pekan Ilmiah Universitas Padjadjaran Dalam Rangka Dies Natalis ,Bandung, 19 November 2009

No	Pilar	2006-2007	2007-2008	2008-2009
9	Kesiapan Teknologi	75	75	88
10	Ukuran Pasar	15	15	17
11	Kecanggihan Bisnis	41	33	39
12	Inovasi	39	41	47

Peringkat Kemudahan Berbisnis

No	Negara	Peringkat Kemudahan berbisnis
1	Singapore	1
2	Malaysia	20
3	Thailand	13
4	Indonesia	129
5	Vietnam	92
6	Philipine	140

Sumber : Bank Dunia, 2009

**Mengerakkan
Sektor Ril**

Ina Primiana
Guru Besar Fakultas Ekonomi Unpad

Disampaikan pada Pekan Ilmiah Universitas Padjadjaran Dalam
Rangka Dies Natalis ,Bandung, 19 November 2009

PETA SEBARAN LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI DAERAH TERTINGGAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

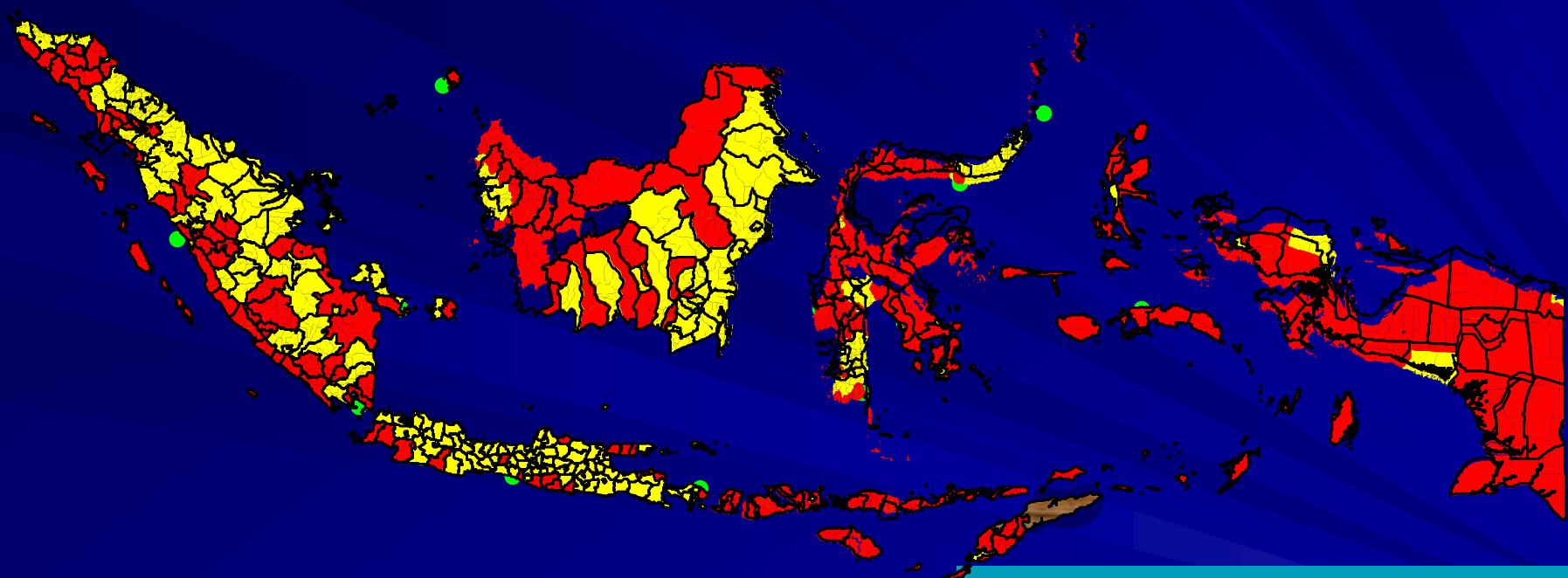
Oleh:

Muhamad Lukman Edy

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

Jakarta, 28 April 2009

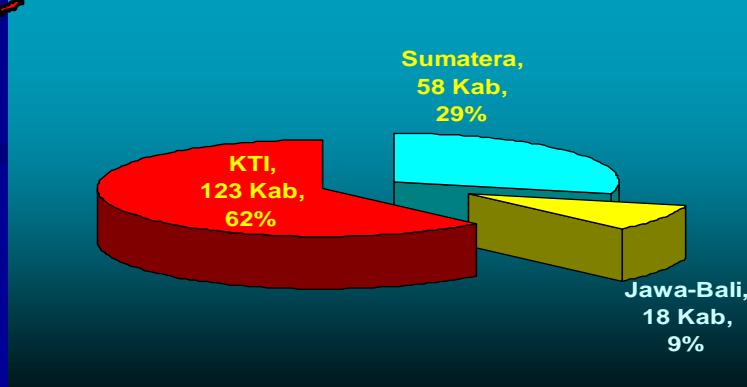
- Daerah Maju
- Daerah Tertinggal



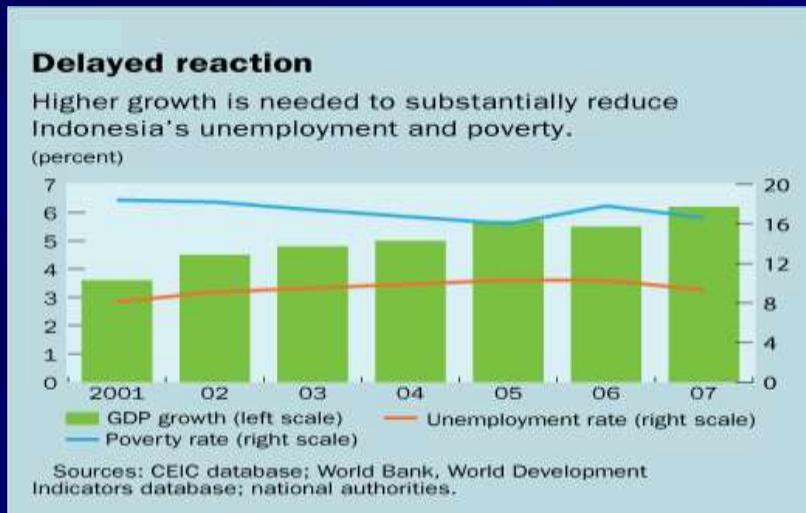
Total : 199 Kabupaten Tertinggal

(43% dari total Kab/Kota, 63% dari luas wilayah Indonesia dengan jumlah penduduk 32% dari total penduduk Indonesia);

Faktor penyebab ketertinggalan: geografi, sumber daya alam, SDM, sarana dan prasarana, rawan bencana dan konflik sosial, kebijakan pembangunan.

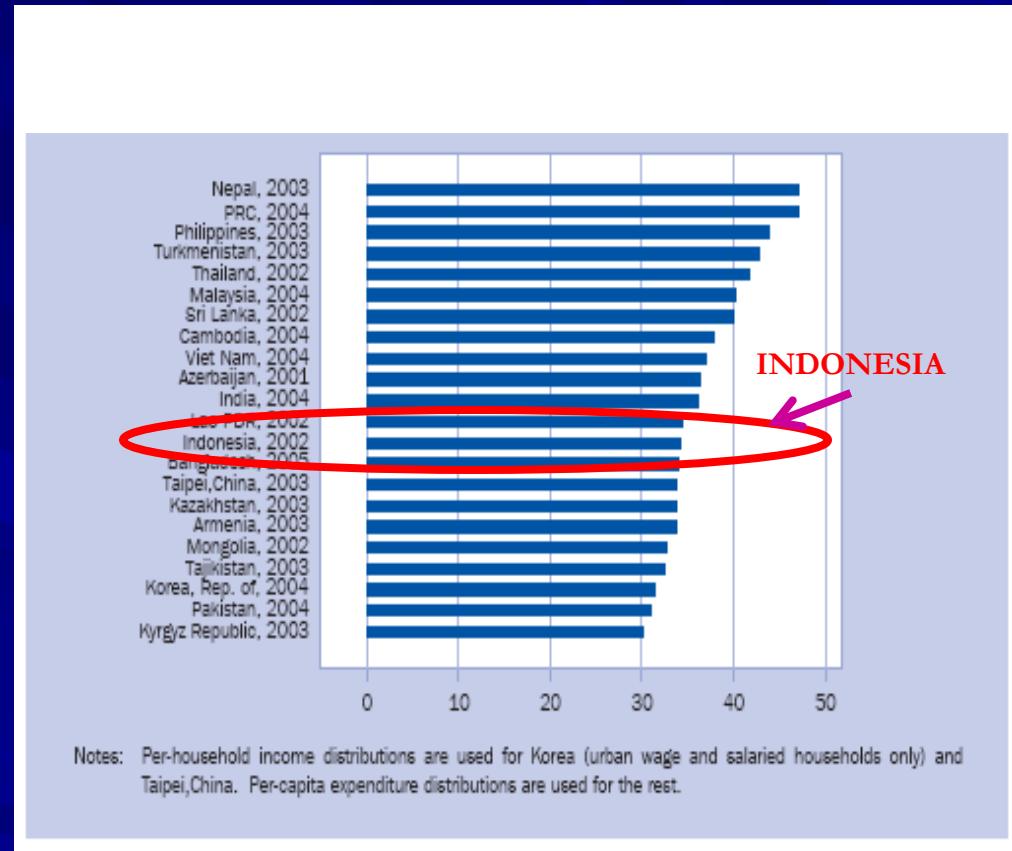


Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat



Sumber: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2007/CAR1010A.htm>

Grafik 1 : Hubungan Antara Pertumbuhan PDB, Angka Kemiskinan, dan Angka Pengangguran



Sumber: ADB, 2007, Inequality in Asia: Highlight Key Indicators 2007 Special Chapter (<http://www.adb.org>)

Grafik 2: Koefisien Gini Negara-Negara Berkembang Anggota ADB (Pengeluaran Konsumsi dan Distribusi Pendapatan)



**SUMBER FOTO:
GOOD GOVERNANCE &
PEMBERANTASAN KORUPSI
DI INDONESIA**

Abdullah Hehamahua

Penasihat KPK

PPSA (Program Pendidikan Singkat Angkatan) XVI

Lemhannas RI, 2009





**SUMBER FOTO:
GOOD GOVERNANCE &
PEMBERANTASAN KORUPSI
DI INDONESIA**

Abdullah Hehamhua

Penasihat KPK

PPSA (Program Pendidikan Singkat Angkatan) XVI

Lemhannas RI, 2009





**SUMBER FOTO:
GOOD GOVERNANCE &
PEMBERANTASAN KORUPSI
DI INDONESIA**

Abdullah Hehamahua

Penasihat KPK

PPSA (Program Pendidikan Singkat Angkatan) XVI

Lemhannas RI, 2009





**SUMBER FOTO:
GOOD GOVERNANCE &
PEMBERANTASAN KORUPSI
DI INDONESIA**

Abdullah Hehamahua

Penasihat KPK

PPSA (Program Pendidikan Singkat Angkatan) XVI

Lemhannas RI, 2009





**SUMBER FOTO:
GOOD GOVERNANCE &
PEMBERANTASAN KORUPSI
DI INDONESIA**

Abdullah Hehamahua

Penasihat KPK

PPSA (Program Pendidikan Singkat Angkatan) XVI
Lemhannas RI, 2009



FALLACIES OF DEVELOPMENT PARADIGMS

Working Paper No. 887

**FALLACIES IN DEVELOPMENT THEORY
AND THEIR IMPLICATIONS FOR POLICY**

by

Irma Adelman

CHANGES IN BOTH THEORY AND POLICY PRESCRIPTIONS ARISE MAINLY FROM THE FOLLOWING FIVE SOURCES:

- **First, there is learning.** As our empirical and theoretical knowledge-base enlarges, new theoretical propositions, or new evidence concerning either resounding real-world successes or conspicuous real world failures, become apparent. These feed into new theoretical or empirical paradigms.
- **Second, there are changes in ideology.** As different power-elites ascend and wane, their ideologies ascend and wane with them. New ideologies provide new prisms through which to view both old theories and old policy prescriptions. When they are inconsistent with new fundamental values, they must be reformulated so as to achieve congruence.
- **Third, there are (exogenous?) changes in the international environment.** When major technological innovations, such as the Industrial or the Communications revolutions, or major global institutional transformations, such as the Post Bretton Woods architecture of the global financial system, take place, they can have major implications for both theory and policy. They can raise new issues, open new opportunities, or close old ones.
- **Fourth, there are changes in domestic institutions, constraints and aspirations.** The dynamics of development themselves fundamentally restructure institutions, relax some constraints while tightening others, and bring new aspirations to the fore.
- **Fifth, there is the culture of the discipline,** which serves to structure the art of discourse and manner of argumentation in the discipline. It determines how the previous four sources of change are incorporated into theories and models.

THE FALLACIES

- three major fallacies arising from the KISS principle that is “Keep It Simple Stupid”. This principle demands simple explanations and universally valid propositions. It has led to three major fallacies, with significant deleterious consequences for both theory and policy:
 - (1) single-cause theories of underdevelopment;
 - (2) single-figure-of-merit criterion of development; and
 - (3) log-linear process of development

FALLACY #1: UNDERDEVELOPMENT HAS BUT A SINGLE CAUSE (X).

- X = Physical Capital (1940-1970)
- X = Entrepreneurship (1958-1965)
- X = Incorrect Relative Prices (1970-1980)
- X = International Trade (1980-)
- X = Hyperactive Government (1980- 1996)
- X = Human Capital (1988-).
- X = Ineffective Government (1997-)

FALLACY #2: A SINGLE CRITERION SUFFICES TO EVALUATE DEVELOPMENT PERFORMANCE

- The deficiencies of per capita GNP as a performance criterion have been extensively analysed (see, e.g. Sen 1988). Suffice it to say that the growth of GNP is indicative only of the extent of national potential for improving the welfare of the majority of the population-- not the extent to which the society delivers on this potential

FALLACY #3: DEVELOPMENT IS A (LOG) LINEAR PROCESS

- Following Solow (1957), a single production function is assumed to characterize all countries. This unique production function is presumed to be a function of the supply of inputs, capital, labor and natural resources.
- Country deviations from this production function are taken to represent productivity differences, whose source is left undefined.
- Accordingly, the rate of growth of total output becomes a function of the rate of change of the physical inputs; that of per capita output (=income) becomes a function of the rate of change of the capital labor ratio, the rate of change of the per capita endowment of natural resources (usually assumed to be zero) and the rate of change of the residual.
- The unique production function approach leads to several erroneous implications. It suggests that:
 - (1) initial conditions do not matter;
 - (2) levels do not matter;
 - (3) there is no path-dependence; and hence that
 - (4) universal policy prescriptions apply to all countries at all points in time, regardless of their current state of socio-institutional and economic development, political structure and policy objectives.**

NEW DEVELOPMENT PARADIGM

Towards a New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Processes

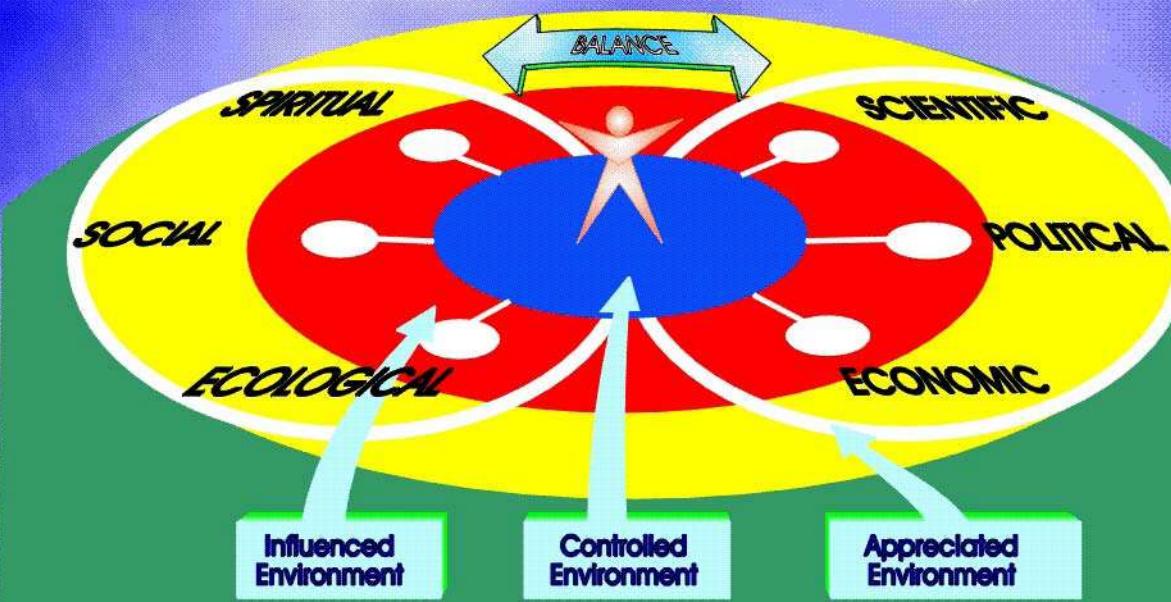
Joseph E. Stiglitz
Senior Vice President and Chief Economist
World Bank

Given as the 1998 Prebisch Lecture at UNCTAD, Geneva
October 19, 1998

DEVELOPMENT IS THE TRANSFORMATION OF SOCIETY

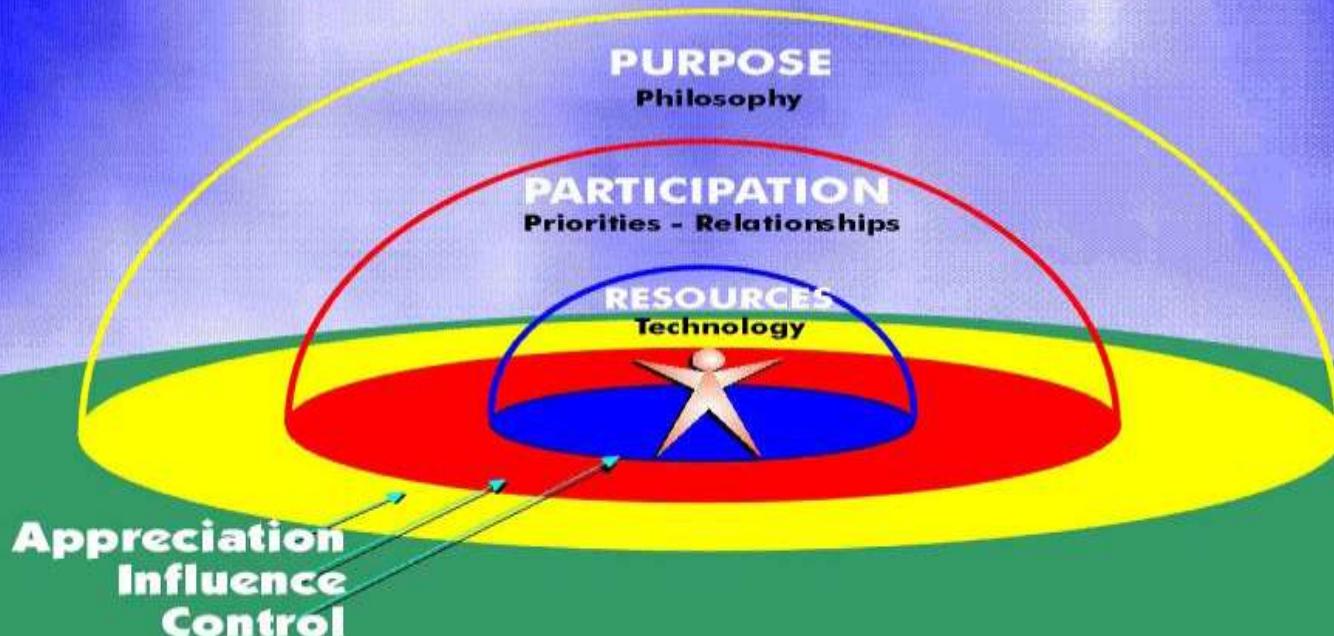
The new development strategy takes as its core objective *development, the transformation of society*. It recognizes that an integral part of successful development is the increase in GDP per capita. But this is only part of the story, and even this will not be achieved unless the country adopts a broader development focus. If successful, the new development strategy will not only raise GDP per capita, but also living standards, as evidenced by standards of health and literacy. It will reduce poverty—our goal should be its elimination, a goal that the more successful economies have actually attained (at least by the *absolute* poverty standard). It will be sustainable, strengthening the environment. And the real societal transformations will enhance the likelihood that the underlying policies will be durable, withstanding the vicissitudes sometimes accompanying democratic processes.

THE IDEALS OF THE NEW DEVELOPMENT PARADIGM



Turid Sato and William E. Smith, 1993

MODEL OF DEVELOPMENT



Turid Sato and William E. Smith, 1993

KERANGKA STRATEGIS PERMASALAHAN ADMINISTRASI NEGARA



AUTOTHERAPHEUTIC MECHANISM

IN THE GOVERNANCE FOR THE TRANSFORMATION OF SOCIETY

